Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 52024-52035

Analisis Spasial Ketersediaan dan Distribusi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Padang Barat Kota Padang

Jahida Qurrota A'yun Assyahidah[1*], Azhari Syarief[2]
[1,2]Program Studi Geografi, Universitas Negeri Padang
Coreponding Author: Jahida Qurrota A'yun, E-Mail: jahidaryn@gmail.com

Published: November 2026

ABSTRAK
Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu komponen penting dalam penataan kawasan perkotaan karena berperan dalam menjaga kualitas lingkungan, meningkatkan kenyamanan masyarakat, serta mendukung keberlanjutan kawasan permukiman. Kecamatan Padang Barat sebagai salah satu kawasan perkotaan di Kota Padang mengalami perkembangan kawasan terbangun yang perlu diimbangi dengan ketersediaan dan pemerataan RTH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan RTH, menganalisis aksesibilitas RTH terhadap kawasan permukiman, serta menentukan prioritas pengembangan RTH di Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Analisis ketersediaan dan distribusi dilakukan melalui inventarisasi dan digitasi RTH serta perhitungan luas dan persentasenya. Analisis aksesibilitas dilakukan menggunakan teknik buffer berdasarkan radius pelayanan RTH dan overlay dengan kawasan permukiman. Selanjutnya, prioritas pengembangan RTH ditentukan melalui analisis weighted overlay dengan mempertimbangkan beberapa parameter spasial yang menggambarkan kebutuhan pengembangan RTH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Padang Barat baru mencapai 99,82 ha (14,26%) belum memenuhi ketentuan minimal 30%,karena proporsi RTH publik masih di bawah batas minimum 20% meskipun RTH privat telah melampaui 10%. Dari aspek keterjangkauan pelayanan, jangkauan fasilitas RTH publik belum terdistribusi secara merata ke seluruh kawasan permukiman. Pemodelan prioritas pengembangan RTH seluas 534,06 ha, menghasilkan prioritas tinggi seluas 139,02 ha (26,03%), prioritas sedang 369,62 ha (69,21%), dan prioritas rendah seluas 25,42 ha (4,76%). Zona prioritas tinggi terkonsentrasi pada kawasan permukiman (51,94%) serta perdagangan dan jasa (24,87%) yang memiliki tingkat kepadatan tinggi dan minim vegetasi, sehingga arahan pengembangan RTH ke depan perlu diprioritaskan pada zona-zona tersebut guna meningkatkan kuantitas sekaligus pemerataan aksesibilitas bagi masyarakat.

Kata kunci: ruang terbuka hijau, permukiman, ketersediaan, aksesibilitas, prioritas pengembangan, SIG

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu komponen penting dalam kawasan perkotaan yang memiliki fungsi ekologis, sosial, estetika, dan mendukung kenyamanan lingkungan. Keberadaan RTH tidak hanya ditentukan oleh jumlah dan luasnya, tetapi juga oleh pemerataan distribusi serta keterjangkauannya terhadap masyarakat. Perkembangan kawasan perkotaan yang ditandai dengan meningkatnya kawasan terbangun dan aktivitas penduduk dapat menyebabkan berkurangnya ruang terbuka dan meningkatnya permasalahan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, perencanaan RTH perlu mempertimbangkan kondisi spasial wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu wilayah yang memiliki karakteristik tersebut adalah Kota Padang, Berdasarkan penelitian (Santoso et al., 2025), distribusi ruang terbuka hijau di Kota Padang cenderung tidak merata, dimana wilayah pusat kota memiliki ketersediaan ruang hijau yang lebih rendah dibandingkan wilayah pinggiran kota. Selain itu juga, berdasarkan RTRW Kota Padang tahun 2021, pembagian penggunaan lahan di Kota Padang menunjukkan adanya perbedaan dalam penempatan ruang terbuka hijau di berbagai wilayah. Kecamatan Padang Barat merupakan salah satu kawasan perkotaan di Kota Padang dengan aktivitas perkotaan dan perkembangan terbangun yang cukup tinggi.

RTH yang tersedia pada suatu wilayah belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal apabila distribusinya tidak merata atau berada di luar jangkauan pelayanan masyarakat. Selain itu, kondisi kenyamanan termal, vegetasi, dan kepadatan penduduk dapat menunjukkan penentuan prioritas ruang terbukan hijau yang berbeda pada setiap wilayah. Penelitian sebelumnya menunjukkan permukaan lahan

terbangun cenderung menyerap panas lebih besar dibandingkan lahan dengan ruang terbuka hijau (RTH), sehingga ketersediaan RTH terbukti berkontribusi dalam menurunkan suhu permukaan (patawari, 2025).

Penelitian RTH menunjukkan bahwa Sistem Informasi Geografis (SIG) banyak digunakan untuk mengevaluasi ketersediaan dan distribusi ruang terbuka hijau. Menurut penelitian Liddiyawatie, Rusdiyanto & Sodikin tahun 2026, menunjukkan bahwa ketersediaan dan distribusi RTH dapat dianalisis menggunakan indikator berbasis GIS untuk mendukung perencanaan ruang hijau perkotaan. Studi mengenai aksesibilitas RTH publik telah berkembang luas, baik dari sisi ketersediaan dan distribusi spasial, keterjangkauan terhadap permukiman, maupun evaluasi persepsi pengguna. alfayed. (2025) di Kota Kendari mengintegrasikan analisis *land use*, *dasymetric mapping*, dan *network analysis* untuk mengevaluasi aksesibilitas RTH publik pada radius 400 m dan 800 m, serta memadukannya dengan persepsi masyarakat melalui uji chi-square dan analisis faktor. Pada aspek penentuan prioritas, pendekatan multi-kriteria juga telah digunakan untuk menentukan lokasi pengembangan RTH. Umar, et al menggunakan metode weight overlay dengan parameter indeks kenyamanan, indeks vegetasi,dan kepadatn penduduk untuk menentukan prioritas pengembangan RTH di Kota Makassar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi parameter lingkungan dan sosial dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi yang memiliki area prioritas pengembangan RTH.

Meskipun penelitian terdahulu telah mengembangkan berbagai pendekatan untuk menganalisis RTH, masih terdapat celah penelitian. Analisis aksesibilitas umumnya berfokus pada pengukuran keterjangkauan RTH, sedangkan penelitian prioritas pengembangan lebih banyak menitikberatkan pada penggabungan sejumlah parameter untuk memperoleh lokasi prioritas. Dengan demikian, ketersediaan dan distribusi RTH, keterjangkauan terhadap kawasan permukiman, serta kebutuhan pengembangan belum selalu dianalisis secara terintegrasi dalam satu kerangka spasial. Padahal, penentuan lokasi pengembangan RTH akan lebih aplikatif apabila wilayah prioritas juga dikaitkan dengan kondisi penggunaan lahan eksisting. Pendekatan integratif tersebut penting agar hasil penelitian tidak hanya menunjukkan kondisi RTH, tetapi juga mampu mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan intervensi pengembangan secara lebih spesifik.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis ketersediaan dan distribusi RTH, aksesibilitas RTH terhadap kawasan permukiman, serta penentuan prioritas pengembangan RTH dalam satu analisis spasial. Prioritas pengembangan ditentukan dengan mengintegrasikan parameter kondisi lingkungan dan sosial melalui metode *weighted overlay*, kemudian hasil prioritas dikaitkan dengan penggunaan lahan eksisting untuk mengidentifikasi lokasi yang berpotensi diarahkan sebagai area pengembangan RTH. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mengevaluasi kondisi RTH yang telah tersedia, tetapi juga menghubungkan kondisi pelayanan RTH dengan kebutuhan pengembangan pada tingkat kawasan permukiman. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan informasi spasial yang lebih komprehensif sebagai dasar perencanaan RTH di Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

Berdasarkan celah (research gap) lapangan, celah empiris, dan celah metode yang ditemukan penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan (1) analisis ketersediaan dan distribusi RTH (2) menganalisis keterjangkauan RTH terhadap permukiman, dan (3) menentukan prioritas pengembangan ruang terbuka hijau berdasarkan kondisi spasial wilayah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi pendukung bagi pemerintah dalam menentukan arahan pengembangan RTH yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik wilayah Kecamatan Padang Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengidentifikasi kondisi keruangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi ketersediaan dan distribusinya, keterjangkauan RTH terhadap kawasan permukiman, serta wilayah yang menjadi prioritas pengembangan RTH. Wilayah kajian ini berada di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dengan luas 7,00 km^2 atau sekitar 1,01% dari total luas Kota Padang dan terletak pada koordinat 0°55'23,01"– 0°57'59,60" Lintang Selatan dan

100°20'55,69"–100°21'49,58" Bujur Timur. Terdiri dari 10 kelurahan dengan jumlah penduduknya 43.476 jiwa pada tahun 2025 (Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padang Tahun 2025).



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas data spasial dan data nonspasial. Data spasial meliputi batas administrasi Kecamatan Padang Barat, RTH eksisting, kawasan permukiman, dan penggunaan lahan. Data nonspasial meliputi data luas RTH, kepadatan penduduk, serta data parameter lingkungan berupa Temparature Humadity Index (THI) dan kerapatan vegetasi yang digunakan dalam analisis prioritas pengembangan RTH. Data RTH diperoleh melalui inventarisasi RTH dari data instansi terkait, interpretasi citra, digitasi, dan verifikasi kondisi RTH. Data pendukung lainnya diperoleh dari instansi pemerintah dan sumber data resmi yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

Instrument penelitian yang digunakan berupa perangkat lunak pengolah SIG, data citra penginderaan jauh, perangkat pengolah data, serta data sekunder dari instansi terkait. Pengumpulan data lapangan dilakukan secara purposive pada objek RTH yang memerlukan verifikasi, dengan mempertimbangkan jenis, lokasi, luas dan kondisi RTH hasil inventarisasi. Penelitian ini tidak menggunakan responden atau informan sebagai sumber data utama karena unit analisis penelitian berupa objek spasial RTH dan kawasan permukiman.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu analisis ketersediaan dan distribusi RTH, analisis keterjangkauan RTH terhadap permukiman, serta analisis prioritas pengembangan RTH. Tahap pengelolaan data diawali dengan proses digitasi On-screen objek RTH berdasarkan hasil NDVI Kecamatan Padang Barat. Setelah digitasi selesai, klasifikasikan objek RTH menurut jenis RTH nya, yaitu RTH publik dan RTH privat. Lalu hitung luas masing-masing objek RTH menggunakan fitur *calculate geometry* pada ArcGIS. Total luas RTH dibandingkan dengan luas wilayah Kecamatan Padang Barat untuk mengetahui persentase ketersediaan RTH. Distribusi RTH dianalisis berdasarkan lokasi dan persebarannya terhadap kawasan permukiman sehingga dapat diketahui wilayah yang memiliki konsentrasi RTH maupun wilayah dengan ketersediaan RTH yang relatif rendah.

Analisis Keterjangkauan RTH dilakukan dengan menggunakan analisis *buffer* berdasarkan radius pelayanan masing-masing jenis RTH. Hasil *buffer* kemudian di-overlay dengan kawasan permukiman menggunakan teknik *intersect/overlay*. Tahapan ini digunakan untuk mengidentifikasi kawasan permukiman yang berada dalam jangkauan pelayanan RTH dan kawasan permukiman yang belum terjangkau oleh RTH.

Analisis prioritas pengembangan RTH dilakukan menggunakan metode *weighted overlay*. Parameter yang digunakan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan tujuan penelitian yaitu kondisi kenyamanan termal yang direpresentasikan oleh THI, kerapatan vegetasi (NDVI), dan kepadatan penduduk. Masing-masing.parameter direklasifikasi menjadi beberapa kelas dan diberikan skor berdasarkan tingkat

kebutuhan pengembangan RTH. Selanjutnya, setiap parameter diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya, kemudian seluruh parameter ditumpangsusunkan menggunakan weighted overlay untuk menghasilkan peta prioritas pengembangan RTH. Hasil akhir diklasifikasikan menjadi beberapa tingkat prioritas, mulai dari prioritas rendah hingga prioritas sangat tinggi.

Tahap terakhir dilakukan dengan melakukan overlay antara wilayah prioritas pengembangan RTH dengan penggunaan lahan eksisting. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui jenis penggunaan lahan yang terdapat pada wilayah prioritas sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan lokasi dan arahan pengembangan RTH yang sesuai dengan kondisi spasial Kecamatan Padang Barat.

HASIL PENELITIAN

Ketersediaan dan distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH)



Gambar 2. Peta Distribusi RTH di Kecamatan Padang Barat

Jika dilihat dari pola penyebarannya secara spasial, Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Padang Barat tampaknya mengelompok (clustered) dan terkonsentrasi di daerah tertentu saja. Sebaliknya, di daerah pusat aktivitas perdagangan dan permukiman padat, terlihat sangat sedikit tutupan vegetasi. Ketimpangan distribusi ruang ini berdampak langsung pada tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap layanan RTH publik di berbagai kelurahan.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Padang Barat berjumlah 99,82 ha, atau 14,26% dari total luas wilayah administrasi kecamatan, menurut hasil inventarisasi, ekstraksi gambar, dan analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis yang ada di wilayah studi. Hasil empiris ini menunjukkan bahwa jumlah RTH di wilayah penelitian masih jauh di bawah standar minimal proporsi 30% yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ada perbedaan yang signifikan antara RTH publik dan RTH privat ketika komposisi RTH di Kecamatan Padang Barat dilihat dari status kepemilikan dan pengelolaannya. Proporsi RTH privat telah melampaui batas minimum 10%, sebagian besar disumbangkan oleh pekarangan bangunan privat, halaman fasilitas komersial, dan vegetasi mandiri masyarakat. Sebaliknya, proporsi RTH publik masih di bawah standar minimal 20% yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan yang dibangun di kawasan perkotaan Padang Barat tidak sebanding dengan jumlah ruang hijau publik yang tersedia. Akibatnya, pemerintah daerah harus mengambil tindakan kebijakan yang lebih agresif untuk meningkatkan jumlah ruang hijau publik.

Keterjangkauan RTH terhadap permukiman

Analisis keterjangkauan dilakukan dengan menghitung proporsi luas permukiman yang berada dalam radius pelayanan taman. Taman yang dianalisis adalah taman yang luasnya memenuhi batas minimal yang diklasifikasikan ke dalam skala pelayanan berdasarkan luas hasil digitasi. Radius pelayanan mengacu

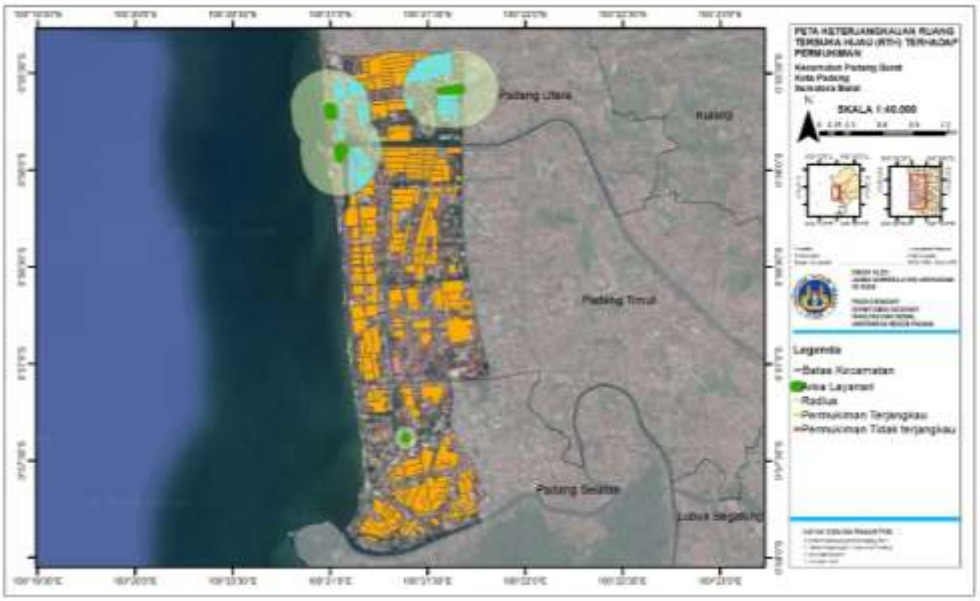
pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022, yaitu 100 m^2 untuk taman RT dan 350 m^2 untuk taman RW.

Tabel 1. Taman yang dianalisis dan radius keterjangkauannya

Taman	Jenis taman (data awal)	Luas digitasi ($m^{2)}$	Skala pelayanan	Radius (m)
Taman Muaro Lasak	Taman Pantai	4.654,19	Taman RW	350
Taman Edukasi Bencana	Taman Kota	4.499,06	Taman RW	350
Taman Rimbo Kaluang	Taman Kecamatan	3.138,48	Taman RW	350
Taman Monumen Gempa	Taman Pedestrian	372,84	Taman RT	100

Sumber. Hasil olahan peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 1, menyajikan daftar objek taman publik di Kecamatan Padang Barat yang dipilih untuk dianalisis tingkat keterjangkauan spasialnya. Di dalam tersebut, terdapat empat sampe taman yang dianalisis, yaitu Taman Muaro Lasak, Taman Edukasi Bencana, Taman Rimbo Kaluang, and Taman Monumen Gempa, lengkap dengan klasifikasi jenis taman berdasarkan data awalnya masing-masing, skala pelayanan dan radius jangkauan spasial setiap taman. Taman Muaro Lasak, Taman Edukasi Bencana, dan Taman Rimbo Kaluang dikategorikan sebagai taman tingkat RW dengan radius pelayanan sejauh 350 m sementara Taman Monumen Gempa masuk dalam kategori taman tingkat RT dengan radius pelayanan sejauh 100 m.



Gambar 3. Peta keterjangkauan RTH terhadap kawasan permukiman

Hasil analisis jangkauan pelayanan menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan permukiman penduduk di Kecamatan Padang Barat belum terlayani secara merata. Kawasan permukiman yang berada di sekitar titik-titik RTH publik eksisting umumnya memiliki tingkat akses yang baik, dimana warga dapat mengjangkau fasilitas ruang terbuka dengan berjalan kaki. Kendati demikian, Sebagian besar wilayah permukiman padat lainnya terutama di kawasan komersial dan permukiman pesisir berada diluar radius pelayanan efektif. Untuk mencapai ruang publik hijau terdekat, sebagian besar warga harus menempuh jarak yang jauh atau melewati koridor jalan raya yang padat.

Tabel 2. Keterjangkauan RTH terhadap permukiman

Kategori	**Luas (ha)**	**Persentase (%)**
Permukiman terjangkau	27,91	14,89
Permukiman tidak terjangkau	159,48	85,11
Total permukiman	**187,39**	**100**

Sumber. Hasil olahan peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 2, luas total permukiman adalah 187,39 ha, hanya 14,89% kawasan permukiman di Kecamatan Padang Barat yang berada dalam radius pelayanan Ruang Terbuka Hijau (taman), sedangkan 85,11% lainnya berada di luar jangkauan. Pada peta, permukiman yang terjangkau terkonsentrasi di sekitar tiga taman skala RW di bagian utara kecamatan. Area layanan layanan taman RT beradius 100 m^2 tampak kecil dan tidak memuat poligon permukiman pada layer yang digunakan.

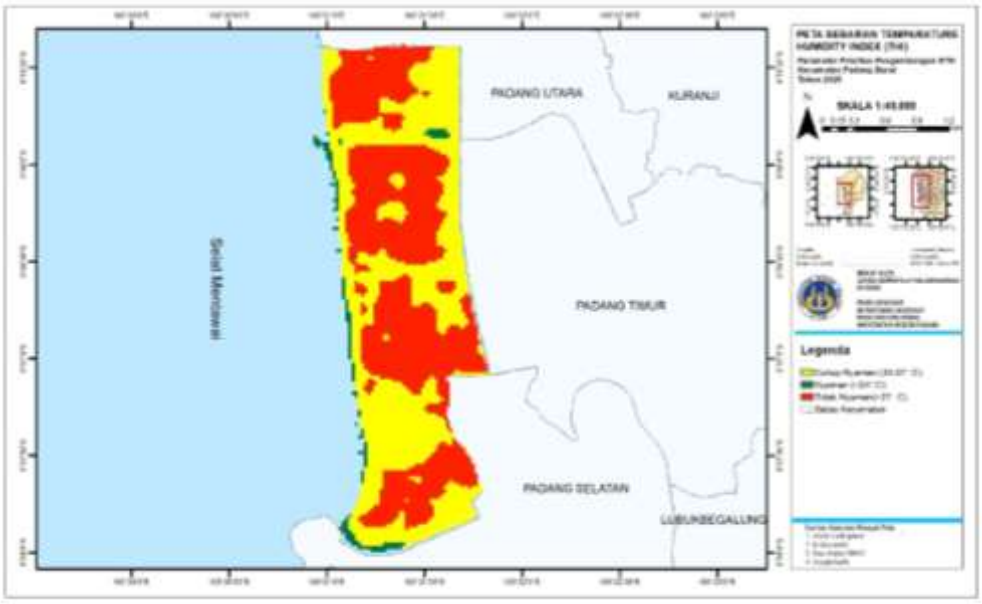
Prioritas pengembangan RTH
Indeks kerapatan vegetasi



Gambar 4. Peta Indeks Kerapatan Vegetasi di Kecamatan Padang Barat

Berdasarkan hasil visualisasi peta NDVI pada gambar 4, wilayah Kecamatan Padang Barat didominasi oleh warna merah yang mengindikasikan kelas kerapatan vegetasi rendah (nilai NDVI <0,2) dengan proporsi luas 330,31 ha atau 61,00% dari total luas wilayah. Persebaran kelas vegetasi rendah ini terkonsentrasi di kawasan inti kota, area permukiman padat, serta koridor perdagangan dan jasa. Sebaliknya, vegetasi dengan kerapatan tinggi (nilai NDVI >0,4) yang berwarna hijau dengan luas 68,54 ha (12,65%) dan kerapatan vegetasi sedang (0,2-0,4) dengan luas 142,68 ha (26,35%) hanya mendominasi pada area-area tertentu yang terbatas. Vegetasi berkerapatan tinggi hanya ditemukan di sekitar RTH eksisting (seperti taman kota/lapangan), koridor sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, serta sisa-sisa pekarangan atau lahan terbuka yang belum mengalami pengalihfungsian lahan menjadi area terbangun.

Indeks Kenyamanan Termal (THI)



Gambar 5. Peta Indeks Kenyamanan Termal di Kecamatan Padang Barat

Gambar 5. Merupakan visualisasi peta THI di Kecamatan Padang yang dibagi menjadi tiga tingkat kenyamanan termal, yang tunjukkan dengan warna merah merupakan kategori zona tidak nyaman (>27 ∘C) dengan luas mencapai 273.37 ha atau setara dengan 50,43% dari total luas wilayah kecamatan yang berada di bagian utara dan tengah kecamatan. Area tidak nyaman ini termasuk area permukiman yang sangat padat, area perdagangan dan bisnis yang tidak memiliki banyak pohon, dan koridor jalan utama di mana panas terkonsentrasi akibat radiasi matahari dan buangan aktivitas manusia pada permukaan beton dan aspal. Warna kuning merupakan kategori zona cukup nyaman (24-27∘C) dengan luas 253,61 ha (46,79%), yang terletak di bagian tengah, selatan, dan pantai Padang Barat. Dan warna hijau merupakan THI dengan kategori nyaman (<24∘C) dengan luas 15,06 ha (2,78%), yang tersebar secara bertahap dan sangat terbatas di daerah yang masih ditumbuhi rumpun vegetasi peneduh yang rindang atau di dekat sempadan perairan. Dominasi area tidak nyaman yang melebihi setengah dari total wilayah Kecamatan Padang Barat ini memiliki korelasi spasial yang sangat kuat dengan Peta NDVI sebelumnya.

Kepadatan Penduduk



Gambar 6. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Padang Barat

Berdasarkan hasil visualisasi peta kepadatan penduduk Kecamatan Padang Barat pada gambar 5 tingkat kepadatan penduduk menunjukkan variasi yang sangat signifikan. Kawasan – kawasan yang berada di pusat perkotaan dan dekat dengan pusat perdagangan (seperti kelurahan di wilayah pesisir tengah hingga utara) memiliki rasio jumlah penduduk perkilometer persegi yang sangat tinggi. Angka kepadatan yang tinggi ini berhubungan langsung dengan banyaknya perubahan fungsi lahan dari area terbuka menjadi bangunan perumahan bertingkat atau permukiman yang padat.

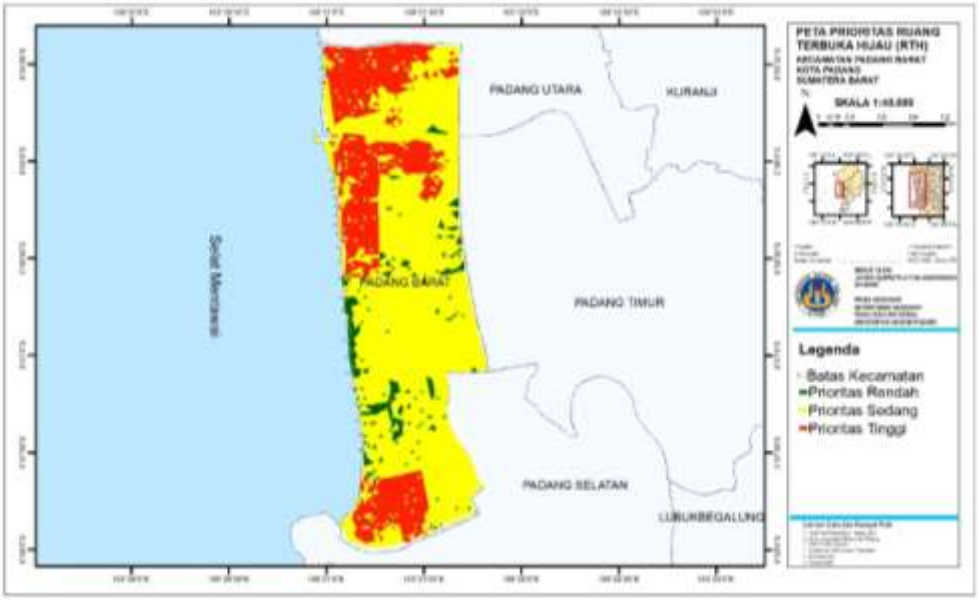
Tabel 3. Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kelas Kepadatan di Kecamatan Padang Barat

No.	Kelas	Skor	Jumlah kelurahan	Penduduk (jiwa)	Persentase penduduk (%)	Luas (km²)	Persentase luas (%)
1.	Rendah	1	5	18.693	43,0	4,45	63,6
2.	Sedang	2	2	8.515	19,6	1,13	16,1
3.	Tinggi	3	3	16.268	37,4	1,42	20,3
Total			10	43.476	100	7,00	100

Sumber. Hasil olahan peneliti, 2026

Kelas kepadatan tinggi hanya menempati 20,3% luas kecamatan, tetapi dihuni 37,4% penduduk. Kelurahan Purus memiliki penduduk terbanyak (7.128 jiwa atau 16,4% dari total), sedangkan Belakang Tangsi paling sedikit (2.340 jiwa). Kampung Jawa adalah kelurahan terluas (1,63 km² atau 23,3% dari luas kecamatan), dan Berok Nipah yang tersempit (0,31 km²).

Prioritas Pengembangan RTH



Gambar 7. Peta Prioritas Pengembangan RTH

Gambar 7, Menyajikan peta prioritas pengembangan RTH di Kecamatan Padang Barat hasil overlay tiga parameter, yaitu kerapatan vegetasi (NDVI), kenyamanan termal (THI), dan kepadatan penduduk. Prioritas dibagi menjadi tiga kelas yaitu, rendah (hijau tua), sedang (kuning), dan tinggi (merah). Secara spasial, prioritas sedang mendominasi hampir seluruh kecamatan dan membentuk hamparan yang menerus dari utara hingga selatan, dengan luas 369,62 ha (69,21%). Prioritas tinggi seluas 139,02 ha (26,03%) tidak tersebar merata, melainkan mengelompok dalam beberapa kantong. Wilayah terluas berada di bagian utara kecamatan, disusul wilayah di bagian tengah sisi barat dan satu wilayah besar di ujung selatan. Ketiga kantong ini sebagian besar berada pada wilayah Kelurahan Purus, Kelurahan Flamboyan Baru, dan Kelurahan Berok Nipah.

Prioritas rendah hanya seluas 25,42 ha (4,76%) dan berupa petak-petak kecil yang tersebar. Petak ini terutama terdapat di sepanjang sisi pesisir barat dan sebagian kecil di bagian tengah kecamatan, yang pada peta kepadatan penduduk berada pada kelas rendah. Apabila prioritas sedang dan tinggi

digabungkan, 95,24% area analisis memerlukan penambahan atau peningkatan RTH. Hasil overlay dengan penggunaan lahan menunjukkan bahwa kantong prioritas tinggi didominasi permukiman (51,94%) serta perdagangan dan jasa (24,87%).



Gambar 7. Peta Penggunaan Lahan di Keamatan Padang Barat

Penggunaan lahan pada area analisis seluas 535,60 ha diklasifikasikan menjadi 12 kategori, yang didominasi oleh perdagangan dan jasa (185,90 ha; 34,81%) dan permukiman (184,48 ha; 34,54%). Penggunaan lahan lainnya yang cukup luas adalah badan jalan (50,49 ha; 9,52%) dan kantor pemerintahan (38,72 ha; 7,25%). Peta ini kemudian ditumpangsusunkan (overlay) dengan peta prioritas RTH untuk mengetahui penggunaan lahan pada setiap kelas prioritas, yang hasilnya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Tabel Luas Area Penyediaan RTH Berdasarkan Penggunaan Lahan di Kecamatan Padang Barat

No.	**Kategori Penggunaan Lahan**	**Prioritas Rendah**	**Prioritas Sedang**	**Prioritas Tinggi**	**Total**
1	Badan Air	0.2	9.94	4.37	14.51
2	Badan Jalan	4.04	33.87	12.58	50.49
3	Fasilitas Kesehatan	0.02	1.06	0.47	1.55
4	Fasilitas Pendidikan	0.69	14.2	1.4	16.29
5	Fasilitas Umum	2.34	11.4	0.88	14.62
6	Kantor Pemerintahan	3.66	29.89	5.17	38.72
7	Objek RTH	0.74	5.58	1.4	7.72
8	Pelabuhan		0.22	0.47	0.69
9	Perdagangan dan Jasa	8.02	143.07	34.82	185.91
10	Permukiman	4.27	107.49	72.72	184.48
11	Sempadan	1.31	8.81	3.8	13.92
12	Tempat Peribadatan	0.13	4.09	0.94	5.16
Total		**25.42**	**369.62**	**139.02**	**534.06**

Sumber. Hasil olahan peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 4, Pada prioritas tinggi (139,02 ha), permukiman mendominasi dengan 72,72 ha (51,94%), disusul perdagangan dan jasa 34,82 ha (24,87%), badan jalan 12,58 ha (9,04%), dan kantor pemerintahan 5,17 ha (3,84%). Permukiman dan perdagangan dan jasa bersama-sama menyusun 76,81% area prioritas tinggi. Pada prioritas sedang (369,62 ha), urutannya adalah perdagangan dan jasa (143,07 ha;38,69%), permukiman (107,49 ha;29,07%), badan jalan (33,87 ha;9,16%), dan kantor pemerintahan (29,89 ha;8,08%). Pada prioritas rendah (25,42 ha), perdagangan dan jasa (8,02 ha; 31,55%) masih menjadi yang terluas, diikuti permukiman (4,27 ha; 16,80%) dan badan jalan (4,04 ha; 15,89%).

Bila dilihat dari sisi tiap penggunaan lahan, permukiman memiliki proporsi prioritas tinggi terbesar di antara dua penggunaan lahan dominan: 39,42% luas permukiman berada di prioritas tinggi, 58,27% di prioritas sedang, dan hanya 2,31% di prioritas rendah. Pada perdagangan dan jasa, 18,73% berada di prioritas tinggi, 76,96% di prioritas sedang, dan 4,31% di prioritas rendah.

Arahan pengembangan RTH

Arahan pengembangan RTH di Kecamatan Padang Barat disusun berdasarkan karakteristik penggunaan lahan pada kawasan prioritas tinggi seluas 140,01 ha. Penggunaan lahan diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu (1) lahan terbangun dan terfungsikan intensif, (2) lahan terbuka dan ruang pergerakan, serta (3) RTH eksisting. Strategi pengembangan difokuskan pada integrasi penghijauan di kawasan terbangun, penyediaan RTH baru pada ruang jalan dan sempadan, serta peningkatan kualitas fungsi ekologis pada RTH yang sudah ada.

Tabel 5. Arahan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada zona prioritas tinggi di Kecamatan Padang Barat

No	Peruntukan Lahan	Kondisi Eksisting	Arahan Bentuk Penanganan RTH	Lokasi Spesifiknya
1	Kawasan Permukiman Padat	• Bangunan rumah saling berdempetan. • Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sangat tinggi. • Suhu mikro permukiman panas (>27∘C) dan minim lahan tanah terbuka.	• Penerapan *Vertical Garden* (taman dinding) pada fasad rumah. • Penghijauan pekarangan sempit menggunakan media pot/planter box. • Pembangunan Taman RT/RW skala mikro (*pocket park*).	• Kelurahan Berok Nipah • Kelurahan Kampung Jao • Kelurahan Kampung Pondok • Kelurahan Olo
2	Kawasan Perdagangan & Jasa	• Perkerasan beton/aspal luas untuk pelataran parkir ruko. • Tutupan tajuk vegetasi sangat minim. • Memicu pantulan panas perkotaan (*Urban Heat Island*).	• Mewajibkan penanaman pohon peneduh berkanopi lebar di area parkir. • Penerapan *Green Roof* (atap hijau) pada gedung/ruko bertingkat. • Pengubahan sebagian perkerasan menjadi *paving block* berpori.	• Sepanjang Jalan HOS Cokroaminoto dan Jl.Moh Yamin • Koridor Jalan Pemuda • Kawasan Jalan Niaga & Batang Arau
3	Koridor Badan Jalan Utama	• Aktivitas lalu lintas harian tinggi. • Trotoar sempit dan minim pohon peneduh bagi pejalan kaki. • Indeks kenyamanan termal (THI) sangat terik di siang hari.	• Penanaman vegetasi jalur hijau (pohon peneduh/pucuk merah) di bahu dan median jalan. • Penataan *shaded pedestrian* (trotoar berteduh) dengan pot vegetasi besar.	• Sebagian ruas Jalan Veteran & Jl.Ir.H.Djuanda • Jalan S. Parman • Jalan Rasuna Said • Jl. Bandar Purus, Jl. Blkg Olo, Jl.Niaga, Jl.Pondok
4	Kawasan Perkantoran & Fasilitas Umum	• Pelataran instansi/sekolah	• Memaksimalkan kembali kewajiban RTH persil instansi (10–20%).	• Kompleks perkantoran di

No	Peruntukan Lahan	Kondisi Eksisting	Arahan Bentuk Penanganan RTH	Lokasi Spesifiknya
		didominasi semen atau aspal. • Sebaran pohon pelindung belum merata di dalam persil bangunan.	• Penataan lansekap halaman dengan rumput hijau dan pohon penyerap polutan.	Kelurahan Padang Pasir • Kawasan fasilitas umum di Kelurahan Rimbo Kaluang

Sumber. Hasil olahan peneliti, 2026

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Ketersediaan dan distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Padang Barat hanya mencapai 14,26%, jauh di bawah target minimal 30%. RTH privat sudah di atas batas minimum 10%, tetapi RTH publik masih di bawah 20%. Pembangunan RTH harus lebih difokuskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas RTH publik
b. Keterjangkauan pelayanan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kawasan permukiman
   Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya 14,89% kawasan permukiman di Kecamatan Padang Barat berada dalam jangkauan pelayanan RTH taman. Sebanyak 85,11% kawasan permukiman lain, terutama di area komersial dan pesisir, berada di luar jangkauan.
c. Prioritas pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan arahan pengembangannya
   Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Padang Barat masih belum mencukupi dan jangkauan layanannya belum merata. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah, seluas 369,92 ha (69,21%), berada pada kelas prioritas sedang. Kelas prioritas tinggi mencakup 139,02 ha (26,03%), didominasi oleh kawasan permukiman dan perdagangan. Pengembangan RTH harus difokuskan pada zona permukiman dan pusat ekonomi dengan kepadatan tinggi dan sedikit vegetasi, serta disesuaikan dengan penggunaan lahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Aswar, M., Beddu, S., & Surur, F. (2019). KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KELURAHAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR Muhammad Aswar 1 , Syarif Beddu 2 , Fadhil Surur 3. *Jurnal Plano Madani*, *8*(No.2), 205–216.

BPS, K. P. (2026). *Kecamatan Padang Barat dalam angka 2026*.

Humaida, N., Budi, L., & Badriyah, S. (2016). Priority assessment method of green open space (case study : Banjarbaru City). *ScienceDirect*, *33*, 354–364. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.03.086

Liddiyawatie, R., Rusdiyanto, E., & Sodikin. (2026). Ketersediaan dan Pola Spasial Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota. *Jurnal Riset Dan Konseptua*, *11*(1), 159–169.

Lizya, S., Ulimaz, M., & Subchan. (2017). ARAHAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK BERDASARKAN KEBUTUHAN PENDUDUK KOTA BALIKPAPAN Soraya. *Jurnal Plano Madani*, *6*(No.2), 153–165.

Nastiti, F. N., & Giyarsih, S. R. (2019). GREEN OPEN SPACE IN URBAN AREAS: A CASE IN THE GOVERNMENT OFFICE OF BOYOLALI, INDONESIA. *Regional Science Inquiry*, *XI*(2), 19–28.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia No.14 Tahun 2022, Pub. L. No. 14 (2022). https://peraturan.bpk.go.id/Details/255207/permen-agrariakepala-bpn-no-14-tahun-2022

Rahma, P. D., & Supriyanti, D. (2018). EVALUASI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KAWASAN PUSAT KOTA KEPANJEN KABUPATEN MALANG. *Jurnal Plano Madani*, *7*(no.2), 221–230.

Santoso, T. A., Arini, D., & Marsiska Driptufany, D. (2025). Pemetaan Ruang Terbuka Hijau Dari Hasil

Citra Landsat 8 Menggunakan Metode Ndvi Di Kota Padang. *Netizen: Journal of Society and Bussiness*, *1*(9), 291–301.

Umar, R., Abidin, M. R., Nur, R., Atjo, A. A., Liani, A. M., Yanti, J., & Utama, I. M. (2022). Penentuan Prioritas Ruang Terbuka Hijau Menggunakan Metode Weighted Overlay. *Jurnal Geosains Dan Remote Sensing (JGRS)*, *3*(2), 88–94.

Wijayanto, W. T. (2009). KAJIAN KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009. In *etd.repository.ugm.ac.id*.